# RAGAM KAJIAN SCIENCE

Volume 3

ISBN : 978-602-95630-6-1

ENTERPISE RISK MANAGEMENT (ERM) SEBAGAI KERANGKA KERJA (FRAMEWORK) DARI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN
**Oleh : Isniar Budiarti (Fakultas Ekonomi – Manajemen)**

PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL
**Oleh : Raeny Dwisanty (Fakultas Ekonomi – Manajemen)**

PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI DI INDONESIA (PERIODE PEMBANGUNAN 1966-1997)
**Oleh : Surtikanti (Fakultas Ekonomi – Akuntansi)**

PERBANDINGAN TINGKAT KEMAMPUAN MOBILISASI DAERAH, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN / KOTA DI PEMERINTAHAN ACEH
**Oleh : Jalaluddin (Fakultas Ekonomi – Universitas Syiah Kuala)**

ANALISIS PELAKSANAAN BAURAN PROMOSI DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH MAHASISWA
**Oleh : Rahma Wahdiniwaty (Fakultas Ekonomi – Manajemen)**

IDENTIFIKASI POTENSI SEKTOR JASA UNGGULAN DI KOTA BEKASI
**Oleh : Rizki Zulfikar (Fakultas Ekonomi – Manajemen)**

SISTEM KEUANGAN SYARIAH
**Oleh : Sri Dewi Anggadini (Fakultas Ekonomi – Akuntansi)**

S EKONOMI UNIKOM
5

UNIKOM PRESS
Jl. Dipati Ukur 112 – 116 Bandung
Telp. (022) 2503054 Faks. (022) 2533754
Website : http://www.unikom.ac.id

# DAFTAR ISI


1. *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)* SEBAGAI KERANGKA KERJA (*FRAMEWORK*) DARI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN 1
ISNIAR BUDIARTI

2. PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL 15
RAENY DWISANTY

3. PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI DI INDONESIA (PERIODE PEMBANGUNAN 1966-1997) 23
SURTIKANTI

4. PERBANDINGAN TINGKAT KEMAMPUAN MOBILISASI DAERAH, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PEMERINTAHAN ACEH 33
JALALUDDIN

5. ANALISIS PELAKSANAAN BAURAN PROMOSI DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH MAHASISWA 43
PADA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG
RAHMA WAHDINIWATY

6. *IDENTIFIKASI POTENSI SEKTOR JASA UNGGULAN DI KOTA BEKASI* 59
RIZKI ZULFIKAR

7. SISTEM KEUANGAN SYARIAH 69
SRI DEWI ANGGADINI

# Perkembangan Praktek Akuntansi Di Indonesia (Periode Pembangunan 1966-1997)

**Surtikanti**
**Fakultas Ekonomi – Akuntansi**

## ABSTRAK

Akuntansi sebagai ilmu terus beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi dimana ia berada, sehingga perkembangan sosial ekonomi juga mempengaruhi perkembangan akuntansi itu sendiri. Paper ini, menjelaskan perkembangan praktik akuntansi di Indonesia pada era pembangunan (1966-1997). Penjelasan dimulai dengan latar belakang perekonomian pada periode pembangunan, meliputi jumlah penduduk, GDP, pertumbuhan ekonomi dan ekspor-impor. Bagian selanjutnya menjelaskan pendidikan akuntansi pada periode pembangunan, Sistem dan metode Akuntansi yang digunakan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkembangan pada sistem dan metode akuntansi, dan terakhir kesimpulan dan penjelasan kesinambungan untuk masa depan.

Kata kunci : Trilogi Pembangunan, Sistem Akuntansi, Metode Akuntansi, Pendidikan Akuntansi.

## PENDAHULUAN

Seiring pemerintahan orde baru pada akhir tahun 1960-an, berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis. Kondisi perekonomian demikian adalah syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dengan terlaksananya pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, stabilnya perekonomian nasional akan menstabilkan inflasi, moneter dan fiskal, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

Keberhasilan pembangunan disuatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti angka harapan hidup *(life expectation)*, tingkat konsumsi protein perkapita, rasio pendaftaran sekolah *(school enrollment ratio)* dan tingkat konsumsi energi. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, salah satu bidang yang harus tumbuh dan berkembang serta mempunyai peranan yang sangat dominan, adalah ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang dikenal dengan pembangunan ekonomi (Ahmad, 2006).

Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan ekonomi, sangat perlu untuk meningkatkan kekuatan dan pendukung ekonomi nasional, termasuk dalam bidang akuntansi. Perkembangan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan kebutuhan akan pelaku ekonomi serta pihak-pihak yang akan menjadi penggerak, penopang, pelaksana, atau manajer pembangunan itu sendiri. Salah satu pihak yang tidak kalah penting peranannya yang berada dalam sistem ekonomi itu adalah akuntansi.

Para akuntan menyajikan informasi keuangan kepada pihak manajemen serta kepada pihak luar yang membutuhkannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Disamping fungsi sebagai penyaji informasi, akuntan juga ikut berperan dalam memberikan landasan yang kokoh di bidang pengamanan, dan pengawasan sumber ekonomi sehingga sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pemilik maupun masyarakat.

Dalam era pembangunan ekonomi Indonesia (1966- 1977) yang dibarengi

perkembangan ekonomi wilayah Asia Pasifik yang begitu cepat , juga menimbulkan semakin banyaknya *kebutuhan akan tenaga ahli ekonomi, bisnis,* keuangan, manajemen, serta akuntan. Kebutuhan akan tenaga ini juga menjadi perhatian negara maju serta lembaga keuangan internasional lainnya termasuk Bank Dunia dan *Asian Development bank* yang kemudian memberikan bantuannya kepada Indonesia. Baik berupa *soft loan* maupun dalam bentuk hibah. Salah satu proyek yang dibiayai oleh bank dunia adalah Proyek Pengembangan Akuntansi tahun 1994.

Perhatian terhadap kebutuhan akan akuntan maupun pengembangan dalam bidang akuntansi ditanah air pada era pembangunan, pada dasarnya sudah banyak yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan maupun anggota profesi akuntan itu sendiri, namun masih banyak kekurangan yang perlu *menjadi perhatian termasuk didalamnya* kualitas sumber daya manusia, sistem pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sebagainya. Hal tersebut telah dilakukan secara berkelanjutan para era berikutnya, yaitu Pasca Krisis Asia sampai sekarang (Soesastro,2005).

**Latar Belakang Perekonomian Indonesia pada Periode Pembangunan (1966- 1997). Jumlah Penduduk Indonesia pada periode Pembangunan**

Jumlah penduduk Indonesia termasuk keempat terbesar didunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, yaitu 2,3% per tahun untuk periode 1971-1980. Dalam periode 1980-1990 laju pertumbuhan turun menjadi 2% per tahun dan dalam periode 1990-2000 diperkirakan turun menjadi 1,8% per tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut penduduk Indonesia akan bertambah dari 178,7 juta menjadi 210 juta pada tahun 2000. Keadaan tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalahan besar baik dalam perekonomian, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang sudah tentu menjadi beban pembangunan nasional. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk Indonesia tahun 1960-1996.

**Tabel 1**
**Jumlah Penduduk Indonesia**
**Tahun 1960 – 1996 (juta)**

| Penduduk | 1960 | 1971 | 1980 | 1990 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 97,0 | 119,2 | 147,5 | 178,7 | 195,3 |

**Sumber: berdasarkan data BPS**

**Arah dan Kebijakan perekonomian periode pembangunan**

Sasaran umum pembangunan ekonomi di Indonsesia (era pembangunan 1966-1997) dinyatakan dalam Trilogi pembangunan, yang prioritasnya disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat itu. **Trilogi pembangunan** adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Guna *mencapai sasaran tersebut, pemerintah* orde baru telah menyusun rencana pembangunan ekonomi secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Rencana tersebut, hingga berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, dituangkan dalan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang terdiri atas Repelita I hingga Repelita V (1969-1995) atau disebut Pembangunan Jangka Panjang Tahap I dan Repelita VI (1996- 1999) yang merupakan bagian dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Sejak Repelita I hingga VI, pemerintah Orde Baru telah menyusun arah pembangunan ekonomi dengan jelas. Sasarannya adalah menciptakan landasan yang kuat bagi

Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, yang pelaksanaannya dititikberatkan pada bidang ekonomi. Sasaran pembangunan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang, yaitu kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung olek kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh (Ahmad, 2006).

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode 1968-1981 menunjukkan bahwa setelah hampir dua dasawarsa, Indonesia mengalami kemajuan dibidang ekonomi. Sejak Repelita I 1969/1970 – 1973/1974, Indonesia mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan akibat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross *Domestic Product (GDP)* melampaui laju pertumbuhan penduduk. Hal ini selanjutnya menyebabkan GDP/setiap kepala untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia naik. Sejak itu, bersamaan dengan terciptanya stabilitas politik serta dilanjutkannya Repelita lainnya, ekonomi Indonesia tumbuh terus dengan laju pertumbuhan rata-rata 7% tiap tahun, melampaui laju pertumbuhan penduduk yang kira-kira 2% pertahunnya. Hal ini telah menimbulkan perubahan maupun pertumbuhan di sektor ekonomi dan sosial.

Selama belasan tahun telah terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran yang cukup berarti dalam struktur ekonomi Indonesia. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan peternakan terhadap GDP semakin mengecil, dari 44% pada tahun 1971 menjadi hanya 32,3% pada tahun 1979, sementara sumbangan sektor-sektor moderen seperti manufaktur dan pertambangan meningkat dari 18,7% pada tahun 1971 menjadi 23,4% pada tahun 1979 ((tabel II), dan pertumbuhan GDP tahun 1978-1981 dapat dilihat pada tabel III.

**Tabel II**
**GDP Secara Sektoral Berdasakan Harga Pasar 1973 konstan, tahun 1968-1979 (dalam persen).**

| Sektor Ekonomi | 1968 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, kehutanan,perikanan | 45,1 | 44,0 | 40,8 | 40,1 | 38,7 | 36,8 | 36,1 | 33,6 | 33,1 | 32,2 |
| Pertambangan | 14,9 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 11,8 | 11,1 | 11,7 | 12,1 | 11,0 | 10,5 |
| Manufacturing | 6,2 | 8,8 | 9,5 | 9,6 | 10,4 | 11,1 | 11,4 | 11.9 | 12,4 | 12,9 |
| Listrik, air dan gas | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,6 | 0.6 | 0,6 | 0,6 |
| Konstruksi | 2,0 | 3,0 | 8,7 | 3,9 | 4,4 | 4.8 | 5,2 | 5.6 | 5,6 | 5,7 |
| Transport dan komunikasi | 2,9 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 4,8 | 3,8 | 5,2 | 4,0 | 5,6 | 4,0 |
| Jasa | 27,1 | 30,1 | 31,3 | 30,9 | 31,8 | 29,8 | 32,1 | 30,2 | 32,5 | 31,9 |
| Total GDP | 100 | 100 | `100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Sumber: berdasarkan data BPS**

**Tabel III**
**Pertumbuhan GDP tahun 1978-1980**
**harga tahun 1973 (persen pertahun)**

| Sektor Ekonomi | 1978 | 1979 | 1980 |
|---|---|---|---|
| Pertanian | 5,3 | 2,2 | 5.0 |
| tanaman pangan | 5,9 | 1,4 | 6,9 |
| Perkebunan | 4,2 | 10,2 | 3,9 |
| Lain-lain | 4,3 | 2,1 | 2,1 |
| Pertambangan | -2,8 | 0,3 | -1,5 |
| Manufakturing | 11,2 | 9,2 | 11,6 |
| Konstruksi | 13,6 | 7,7 | 9,4 |
| Listrik, gas dan air Jasa | 4,0 | 6,9 | 9,2 |
| Total GDP | 6,8 | 4,9 | 7,0 |

**Sumber: berdasarkan data BPS**

Perkembangan perekonomian Indonesia pada peride 1982-1987 ditandai dengan melemahnya harga minyak dunia pada tahun 1982 dan tahun 1986 yang berakibat pada memburuknya kinerja perekonomian Indonesia. Namun demikian, kinerja sektor pertanian dan dampak yang terjadi akibat besarnya investasi dalam bidang yang berkaitan dengan minyak bumi menyebabkan perekonomian tetap tumbuh rata-rata 4 persen pertahun pada periode 1982-1986. Selain itu penurunan harga minyak tahun 1982 mengakibatkan Neraca Pembayaran Indonesia memburuk terutama pada tahun 1983. Penurunan harga minyak juga menurunkan penerimaan APBN, dimana 60% berasal dari pajak perseroan minyak. Kondisi ini diperburuk dengan terjadinya resesi perekonomian dunia yang menimpa negara-negara industri dan melemahnya nilai tukar USD terhadap Yen pada tahun 1985, sehingga beban utang Indonesia meningkat tajam, karena hampir 40% utang Indonesia dalam mata uang Yen (Soesastro, 2005).

Penurunan harga minyak kembali terjadi pada tahun 1986, dari $ 25 per barel pada tahun 1985 menjadi $ 23 per barel pada awal tahun 1986 yang ditambah dengan penurunan harga ekspor komoditi utama yang mengakibatkan neraca perdagangan *(trade balance)* memburuk 34%, akibatnya pendapatan nasional juga menurun 5%. Namun demikian, upaya pemerintah dalam mengatasi dampak penurunan harga minyak melalui peningkatan ekspor non-migas selama periode 1983-1985, kemudian berbagai langkah deregulasi sejak tahun 1986 cukup berhasil . Selain itu Indonesia juga mendapat keuntungan dari pulihnya perekonomian negara-negara maju setelah tahun 1983/1984. Perekonomian Indonesia sejak tahun 1986 hingga pertengahan tahun 1997 mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Selama periode 1982-1997, deregulasi dan liberalisasi perekonomian di Indonesia telah diwujudkan dengan berbagai kebijakan, baik disektor perdagangan, keuangan, maupun sektor riil khususnya manufaktur. Selain dampak positif berupa meningkatnya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, liberalisasi membawa dampak negatif, yaitu dominasi ekonomi dan meruncingnya kesenjangan. Selain itu, perkembangan sektor finansial yang pesat tanpa disertai pengawasan yang ketat dan lemahnya peraturan mengakibatkan sektor ini semakin rentan terhadap goncangan-goncangan dari luar. Ketika pada tanggal 1 November 1997 terjadi penutupan 16 bank secara tiba-tiba tanpa disertai persiapan pasca penutupan yang cukup, maka situasi ini memicu timbulnya kepanikan di sektor perbankan. Akibatnya terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sektor finansial yang ditandai dengan penarikan likuiditas, *rush bank* dan kemerosotan total sektor finansial.

**Ekspor dan Impor Nasional pada Periode Pembangunan**

Selama Era Pembangunan Ekonomi Indonesia, sektor pertanian selalu menjadi titik berat pembangunan ekonomi. Titik berat pembangunan sektor pertanian tersebut selalu disebutkan pada setiap repelita, kecuali Repelita VI. Bahkan pembangunan sektor-sektor lainnya, terutama industri, diarahkan untuk menunjang pembangunan sektor pertanian. Dalam periode pembangunan, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar dalam ekspor disamping migas. Beberapa komoditas sektor pertanian seperti minyak sawit, karet, kopi, teh, tembakau, lada, kayu, udang dan lainnya merupakan sektor andalan.

Dalam upaya meningkatkan neraca perdagangan, pemerintah telah berusaha untuk mendorong ekspor, khususnya ekspor non-migas. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan. Sektor yang mempunyai peran besar dalam perdagangan internasional Indonesia adalah sektor industri. Sektor ini berperan besar dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui ekspor. Pada tahun 1977 ekspor industri Indonesia berdasarkan golongan produk terutama barang-barang buatan pabrik,perlengkapan mesin dan pengangkutan serta berbagai jenis buatan pabrik terus mengalami peningkatan yaitu sekitar Rp.11 trilyun, kemudian meningkat menjadi Rp. 53,4 trilyun pada tahun 1997. Namun sampai dengan tahun 1990 ekspor Indonesia masih didominasi oleh industri migas, setelah tahun 1990 ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor non-migas.

Pada periode pembangunan, tingkat pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor. Hal ini mengakibatkan surplus neraca perdagangan kian mengecil. Sedangkan rasio impor terhadap GDP tetap selama 20 tahun. Kenyataan ini merupakan sinyal bahwa pemerintah belum berhasil menurunkan beban impor dalam perekonomian nasional. Lebih memprihatinkan lagi adalah proporsi impor barang konsumsi tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Pasalnya, kebijakan substitusi impor belum berhasil mengurangi impor barang konsumsi (Ahmad, 2006).

**Perkembangan Praktek Akuntansi di Indonesia pada Periode Pembangunan (1966-1997).**

Akuntansi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan semakin jelasnya pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Perkembangan akuntansi, baik akuntansi yang dimaksudkan untuk kepentingan internal, manajemen sampai pada akuntansi keuangan untuk kepentingan publik. Pemicu perkembangan pesat ilmu akuntansi, disebabkan karena gelombang *scientific management* dan bertambah meluasnya kepemilikan dan keterlibatan berbagai pihak dalam manajemen perusahaan.

Perkembangan praktek akuntansi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan kata lain, negara luarlah yang membawa akuntansi masuk ke Indonesia, walaupun tidak bisa disangkal bahwa masyarakat di Indonesia pasti punya sistem pelaporan tersendiri, misalnya pada masa keemasan Sriwijaya. Akuntansi masuk ke Indonesi diperkirakan melalui Pedagang Arab yang melakukan transaksi bisnis di Kepulauan Nusantara.

**Pendidikan Akuntansi pada Periode Pembangunan.**

Dunia pendidikan tinggi dimana kurikulum akuntansinya yang berpola Belanda masih berpengaruh kuat sampai dengan pertengahan dasawarsa tahun 1970an. Dalam masa itu, untuk memperoleh gelar akuntan harus melalui sistem yang panjang dengan lama pendidikan 6 tahun yaitu 4 tahun untuk studi ekonomi perusahaan (manajemen) ditambah 2 tahun studi akuntansi.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang gelar akuntan, semua orang dapat menyatakan dirinya selaku akuntan dan memakai gelar akuntan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah mengatur mereka yang berhak memakai gelar akuntan hanyalah

mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi Negeri Jurusan Akuntansi dan Swasta yang sisamakan, diatur oleh Panitia Persamaan *Ijasah Akuntan*. Dengan semakin banyaknya Fakultas Ekonomi swasta maka pemerintah bersama IAI mengatur pelaksanaan Ujian Negara Akuntan. Sejarah perkembangan dunia pendidikan tinggi akuntansi waktu itu mengalami kemajuan yang menarik, yaitu fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam dasawarsa 1960-an membuka Jurusan Akuntansi dengan muatan kurikulumnya dan sistemnya berpola Amerika.

Arah perkembangan dunia pendidikan akuntansi pada periode pembangunan, semakin baik sejak Konsorsium Ilmu Ekonomi (KIE) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdiri pada tahun 1975, menetapkan syarat-syarat minimal Kurikulum Jurusan Akuntansi berpola Amerika, untuk seluruh Fakultas Ekonomi Negeri.

Sejalan dengan itu Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) sebagai lembaga di bawah Konsorsium Ilmu Ekonomi, yang berkedudukan di Fakultas Ekonomi Negeri setempat, sejak tahun 1979 bertugas antara lain:

1. Mengintegrasikan satu pola pendidikan akuntansi, yaitu pola Amerika.
2. Sebagai pelaksana Ujian Nasional Akuntansi (UNA) bagi peserta yang berasal dari lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Swasta maupun Negeri yang belum memenuhi persyaratan memakai gelar akuntan. Setelah menempuh dan lulus ujian UNA dalam dua tahap, yaitu UNA Dasar dan UNA Profesi, yang bersangkutan berhak memakai gelar akuntan sesuai dengan UU No. 34 tahun 1954, *tentang pemakaian gelar akuntan*.

Dalam rangka meningkatkan penguasaan akuntansi terhadap pengetahuan dan kompetensi teknis dibidang akuntansi, dan untuk menyongsong keterbukaan dalam era perdagangan bebas, maka IAI dengan dukungan Departemen Keuangan RI menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), dengan tujuan untuk menguji kemampuan akuntan untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik. Adapun mata kuliah yang diujikan adalah: (1). Teori dan Praktek Akuntansi Keuangan, (2) Auditing dan Jasa Profesional Akuntan Publik Lainnya, (3) Akuntansi Manajemen dan manajemen keuangan (4) Sistem Informasi Akuntasi (5) Perpajakan dan Hukum Komersial.

Peserta USAP hanya dapat diikuti oleh mereka yang memilki gelar akuntan. Ujian USAP diselenggarakan pertama kali pada bulan September 1997 dan akan dilaksanakan dua kali dalam setiap periode atau setiap tahun. Akuntan peserta USAP yang dinyatakan lulus seluruh mata kuliah ujian berhak memperoleh sebutan Bersertifikat Akuntan Publik (BAP) yang dikeluarkan IAI. Sertifikat Akuntan Publik tersebut adalah salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan RI.

*Disamping itu* IAI sebagai organisasi profesi telah memfasilitasi anggotanya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) Keterampilan Profesional (2) Pengetahuan Profesional, (3) Etika Profesi.

**Sistem dan metode akuntansi yang digunakan**

Pada awalnya, sistem akuntansi yang digunakan di Indonesia adalah sistem akuntansi Belanda yang dikenal dengan Tata Buku. Sistem ini sebenarnya merupakan subsistem dari ilmu akuntansi dalam bidang metode pencatatan. Pada tahun 50an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan modal asing mulai masuk ke Indonesia. Modal asing yang masuk pada saat itu umumnya berasal dari *perusahaan* Amerika, Sebagaimana awalnya maka sudah barang tentu perusahaan Amerika juga membawa sistem akuntansi sendiri yang harus diikuti perusahaan miliknya di Indonesia. Pada saat yang sama. Perusahaan yang adamasih tetap mengikuti sistem akuntansi Belanda yang sudah mapan. Sejak saat itu muncullah dualisme dalam sistem akuntansi di Indonesia (Tuanakotta, 2007).

Masuknya modal asing di Indonesia bersamaan dengan masuknya bantuan luar negeri khusunya dari Amerika dan *sekutunya sehinggga Pemerintah Amerika* juga memberikan bantuan berupa sistem akuntansi di pemerintahan berupa dosen-dosen tamu yang mengajar di berbagai universitas dan memberikan beasiswa kepada dosen Indonesia untuk belajar di Amerika. Hal ini menjadikan munculnya sistem baru, buku-buku teks akuntansi Amerika dan menjadi bahan pelajaran di Universitas, ahli-ahli akuntansi pun semakin banyak. Keadaan ini semakin luas sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan hubungan internasional dan ekonomi yang semakin erat, sehingga sistem akuntansi Amerika semakin dominan.

Pada tahun 1980 pemerintah Indonesia atas bantuan pinjaman dari World Bank melakukan upaya harmonisasi sistem akuntansi sehingga diupayakan untuk menghapus dualisme tadi. Upaya yang *dilakukan antara lain mendirikan* Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) di empat universitas UI, UGM, UNPAD, dan USU. PPA ini disamping memberikan beasiswa kepada dosen-dosen perguruan tinggi juga melakukan penataran akuntansi kepada seluruh guru-guru Tata Buku di SMEA maupun SMA diseluruh Indonesia.

Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu wadah organisasi profesi akuntansi Indonesia, yang berdiri pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta, telah menyusun dan menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dengan maksud antara lain, menghimpun prinsip-prinsip yang lazim berlaku di Indonesia dan sebagai prasarana bagi terbentuknya pasar uang dan modal di Indonesia pada waktu itu, dimana laporan keuangan dari perusahaan yang akan *go public* harus disusun atas dasar prinsip-prinsip akuntansi tersebut.

PAI 1973 adalah hasil kerja Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur dari *Generally Accepted Accounting Principles dan Generally Accepted Auditing Standards* yang terdiri dari Dewan Penasihat Panitia Kerja, antara lain telah berhasil menghimpun dan mengkodifikasikan prinsip akuntansi. Hasilnya kemudian disahkan pada kongres III tanggal 2 Desember 1973, pada saat menjelang diaktifkannya kembali pasar uang dan modal.

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk menghimpun Prinsip Akuntansi 1973 tersebut, adalah:

1. Buku *Prinsip-prinsip accounting* yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntan Negara, Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) Departemen Keuangan RI yang sekarang bernama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise,* oleh Paul Grady, yang diterbitkan oleh AICPA.
3. *Opinions of Accounting Principles Board,* diterbitkan oleh AICPA.
4. Kumpulan dari *Accounting Research Bulletins (ARBs),* diterbitkan oleh AICPA.
5. *A Statement of Australian Accounting Principles,* diterbitkan oleh Accounting and Auditing Researh Committee dari Accounting Research Foundation.
6. *Wet op de Jaarekening van ondernemingen,* diterbitkan oleh NIVRA, dan beberapa literatur lainnya.

PAI 1973 1ni, setelah berjalan selama satu dasawarsa kemudian disempurnakan lagi dengan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Prinsip Akuntansi 1984 adalah sebagai ganti PAI 1973. Sama dengan PAI 1973, perumusan prinsip, prosedur, metode, dan teknik-teknik dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 ini, dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan yang diungkapkan secara garis besar atau bersifat umum, tidak mencakup praktik akuntansi untuk industri tertentu. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang memerlukan penjabaran lebih lanjut diatur dengan pernyataan tersendiri. Sehubungan hal tersebut, komite PAI-IAI mulai pada tahun 1986 menerbitkan serangkaian Pernyataan PAI dan Interpretasi PAI untuk mengembangkan, manambah, mengubah serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari PAI 1984. Setelah berlangsung selama sepuluh tahun PAI 1984 diganti dengan Standar Akuntansi *Keuangan 1994*. *Standar* Akuntansi Keuangan 1994 mengadopsi pernyataan resmi *(pronouncements) International Accounting Standars Committee (IASC)*. IAI mengadopsi *statements* atau pernyataan IASC sebagai dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kemudian menerbitkan dua buku, yaitu *Standar Akuntansi Keuangan Oktober 1994*, buku satu dan dua yang berisi (1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, serta (2) Seperangkat Standar Akuntansi Keuangan, terdiri dari 35 pernyataan yang setaraf standar internasional. Kerangka dasar dan seperangkat pernyataan tersebut, merupakan landasan yang dianggap kokoh untuk pengembangan lebih lanjut. Berlaku *untuk penyusunan laporan keuangan* mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 januari 1995.

**Faktor Pendorong Perkembangan Sistem & Metode Akuntansi Pada Periode Pembangunan.**

Faktor pendorong dalam perkembangan sistem dan metode akuntansi pada periode pembangunan ini adalah kebijakan trilologi pembangunan yang dicanangkan pemerintahan orde baru pada kegiatan repelita. Pembangunan Indonesia pada periode pembangunan ini membuka peluang bagi penanaman modal asing. Sehingga pada periode ini pemerintah membuka kebijakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Pada bagian penanaman modal asing (PMA) sangat memerlukan akuntan untuk melakukan pengesahan pada laporan *keuangan sebagai dasar penilaian investasi* bagi investor asing. Disinilah mulai berkembang ilmu auditing. Faktor pendorong lainnya adalah selalu ada upaya-upaya dari anggota IAI untuk berperan dalam kemajuan perkembangan ilmu akuntansi dengan membuat perbaikan pada standar akuntansi keuangan, standar profesional akuntan publik, pembuatan standar akuntansi pemerintahan yang sangat dibutuhkan oleh akuntan baik intern maupun ekstern. Keterbukaan kerjasama antara Departemen Keuangan RI dan IAI *serta rekan akademisi sangat berperan* dalam memberikan solusi bagi perkembangan keilmuan akuntansi di dalam penyelesaian kebijakan sektor keuangan. Kegiatan perkembangan sistem akuntansi harus juga mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. Kegiatan perkembangan metode akuntansi lebih kearah penggunaan *dual method* yaitu *accrual basic* dan *cash basic*.Penggunaan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan user dalam kegiatan transaksi akuntansinya.

**Kesimpulan**

Perkembangan praktek akuntansi di Indonesia pada Periode Pembangunan dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang meningkat seiring dengan perkembangan *perekonomian di periode pembangunan* membawa angin segar bagi penanaman modal asing di Indonesia dengan meningkatnya komoditi perdagangan di bidang eksport dan impor Indonesia. Hal ini menguntungkan bagi profesi akuntan dalam memberikan jasanya dibidang akuntansi terutama auditing bagi perusahaan yang akan berinvestasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Pendidikan akuntansi pada periode pembangunan mengalami kemajuan dengan berafiliasinya KAP asing di Indonesia. Proses pendidikan diatur dalam pemakaian gelar akuntan. Dulu setiap orang bebas menggunakan gelar akuntan, sejak diterbitkan ketentuan PPA bagi setiap lulusan akuntansi maka pemberian gelar akuntan diperoleh setelah mengikuti sertifikasi yang *dilaksanakan oleh Departemen* Keuangan RI bekerjasama dengan 4 perguruan Tinggi Negeri.Sehingga gelar akuntan dapat lebih berkualitas.
3. Sistem akuntansi yang berlaku di periode akuntansi telah menggunakan sistem yang ada di Amerika. Metode akuntansi telah diperbaiki dari sistem tata buku menjadi standar pencatatan yang berlaku seperti pencatatan akuntansi di Amerika.

Dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

4. *Faktor yang mendukung terjadinya* perkembangan pada sistem dan metode akuntansi di periode pembangunan ini adalah kegiatan Trilogi pembangunan dalam Repelita dan pembukaan investasi luar negeri dalam penanaman modal asing di Indonesia.
5. Kesinambungan perkembangan akuntansi di Indonesia dapat terus berkembang seiring dengan aktivitas transaksi perusahaan dan kebijakan pemerintah disektor keuangan. Dengan memberikan keterbukaan pada proses implementasi standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntan publik. Saat ini sudah dikembangkan standar akuntansi pemerintahan yang berguna untuk melayani proses akuntansi bagi sektor pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**


Ahmad, Irdam, dan Ilyas Saad, 2006. *Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan di Indonesia*. STEKPI, Jakarta.

Belkaoui Ahmed, 1984, Socio Economic Accounting, Quorum Books

Sudibyo, bambang, 1987. Rekayasa Akuntansi dan Permasalannya di Indonesia, Akuntansi No. 6 Juni, halaman 36-47.

Soesastro,Hadi dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir,*. Buku 3 dan 4, KANISIUS., Yogyakarta.

Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Setengah Abad Profesi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.